

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Digitalisasi Administrasi Menurut Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan bahwa proses digitalisasi administrasi publik telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal.

Kecamatan Tambun Selatan telah mengadopsi sejumlah sistem berbasis digital, seperti layanan surat menyurat online, sistem arsip elektronik, dan pendaftaran daring, sebagai upaya mendukung transformasi pelayanan publik. Implementasi kebijakan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam beberapa aspek pelayanan administrasi.

Namun demikian, masih terdapat kendala yang cukup signifikan, di antaranya:

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Kualitas jaringan internet yang belum stabil di seluruh unit pelayanan, Kurangnya integrasi antar sistem digital antara kecamatan dan kabupaten. Resistensi sebagian pegawai terhadap perubahan pola kerja manual ke digital serta Rendahnya literasi digital masyarakat, sehingga pemanfaatan layanan daring belum merata.

Meski demikian, terdapat pula faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan implementasi, yaitu komitmen pimpinan kecamatan, dukungan Dinas Kominfo Kabupaten Bekasi, tersedianya infrastruktur dasar, serta adaptabilitas sebagian aparatur terhadap inovasi digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi administrasi di Kecamatan Tambun Selatan sudah berada pada tahap implementasi awal yang progresif, namun belum mencapai tahap integratif dan

berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang SPBE. Upaya optimalisasi diperlukan agar pelaksanaan SPBE benar-benar mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

5.2 Saran

Melalui berbagai upaya dan rekomendasi tersebut, diharapkan Kecamatan Tambun Selatan dapat menjadi model kecamatan digital di Kabupaten Bekasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Optimalisasi SPBE tidak hanya akan meningkatkan kinerja birokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta memperkuat prinsip good governance di era digital.

Dengan terwujudnya digitalisasi administrasi yang optimal, Kecamatan Tambun Selatan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh aparatur pemerintahan dalam mengembangkan dan memanfaatkan sistem digital secara maksimal.

Pemerintah Kecamatan sebaiknya terus melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendampingan teknis agar setiap pegawai mampu beradaptasi dengan perubahan sistem kerja berbasis teknologi informasi. Selain itu, perlu dilakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem digital secara berkala, guna memastikan keamanan data serta kelancaran proses administrasi.

Penting pula untuk memperkuat koordinasi antarbidang dan antarinstansi, baik di tingkat kecamatan maupun desa, agar proses digitalisasi berjalan terpadu dan tidak menimbulkan tumpang tindih data atau prosedur. Pemerintah daerah juga disarankan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti penyedia teknologi atau lembaga

pendidikan, untuk mendukung pengembangan inovasi digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan digitalisasi administrasi di Kecamatan Tambun Selatan tidak hanya menjadi bentuk modernisasi sistem, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.